

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa sebagai Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Ade Damayanti Vina Giovani¹, Makmuralto², Rahmat Eko Prabowo³, Lilis Nur Alya⁴
Nurhaizatul⁵

^{1,4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Wira Bhakti, Indonesia

^{2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Wira Bhakti, Indonesia

E-mail: adegeo0585@gmail.com^{1*}, makuralto@gmail.com², bowosr@gmail.com³,
nurhaizatul342@gmail.com⁴, nuralyalilis@gmail.com⁵

Article History:

Received: 15 Agustus 2026

Revised: 30 Agustus 2026

Accepted: 01 September 2026

Keywords: *accountability; village audit; financial performance; village government; Gowa Regency*

Abstract: *This study aims to analyze the influence of village financial management accountability and village audit on the financial performance of village governments in Gowa Regency. The study uses an explanatory quantitative approach with primary data from survey results of 207 village officials in 72 villages. The instrument consists of 22 items with a Likert scale of 1–5, including eight items of village financial management accountability, eight items of village audit, and six items of village government financial performance. The analysis was carried out through descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression with Robust Standard Errors HC3. The results showed that village financial management accountability had a positive and significant effect on financial performance ($\beta = 0.2058$; $t = 3.5316$; $p = 0.0004$). Village audits also had a positive and significant effect ($\beta = 0.3780$; $t = 7.7800$; $p < 0.001$) and became the strongest relative predictor with a standardized beta of 0.4734. Simultaneously the two variables were significant ($F = 71.9022$; $p < 0.001$) with R^2 0.4135. The findings emphasized the importance of strengthening accountability and especially the effectiveness of audits and follow-up recommendations to improve village financial performance.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola Dana Desa dan sumber pendapatan lainnya. Peningkatan kewenangan fiskal tersebut pada saat yang sama menuntut aparatur desa memiliki kapasitas yang memadai untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai ketentuan. Proposal

penelitian menegaskan bahwa peningkatan alokasi dana desa belum selalu diikuti peningkatan kinerja keuangan yang optimal, antara lain karena lemahnya perencanaan, ketidaktepatan pelaporan, dan belum optimalnya pemanfaatan hasil pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya sumber daya fiskal tidak dengan sendirinya menjamin kualitas kinerja keuangan desa.

Pada konteks tata kelola publik, akuntabilitas menjadi mekanisme penting untuk memastikan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan. Damayanti et al. (2021) menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan desa. Namun, Harun et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan dana desa tidak selalu menghasilkan kualitas pengelolaan dan kinerja yang lebih baik ketika kapasitas aparatur dan pengawasan masih lemah. Sofyani et al. (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan masyarakat apabila mekanisme pengawasan belum efektif. Temuan yang beragam tersebut menunjukkan pentingnya menguji akuntabilitas dan mekanisme audit secara bersama-sama dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah desa.

Audit desa merupakan mekanisme pemeriksaan dan pengawasan yang dapat membantu mengidentifikasi kelemahan pengelolaan, memastikan kepatuhan, mendorong koreksi, dan meningkatkan kualitas pengendalian. Olken (2007) menunjukkan pentingnya mekanisme monitoring dalam menekan penyimpangan pada konteks pemerintahan lokal. Dalam pengelolaan dana desa, Sugiharti et al. (2021) menekankan fungsi pengawasan untuk mencegah korupsi, sedangkan Rivan dan Maksun (2019) menunjukkan pentingnya sistem keuangan desa dalam mendukung pengelolaan yang tertib. Dengan demikian, audit tidak semata-mata diposisikan sebagai aktivitas menemukan kesalahan, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan tata kelola.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan karakteristik desa yang beragam dan pentingnya penguatan tata kelola serta pengawasan keuangan desa. Berdasarkan proposal penelitian, kondisi pengelolaan keuangan publik di Sulawesi Selatan masih memerlukan perbaikan, sehingga penguatan tata kelola pada level pemerintahan desa menjadi relevan. Penelitian ini secara empiris memfokuskan pada dua determinan, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan audit desa, untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel dan pengaruh keduanya secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

LANDASAN TEORI

Stewardship Theory memandang pengelola organisasi sebagai steward yang berorientasi pada kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Dalam pemerintahan desa, aparatur desa merupakan pengelola amanah publik yang bertanggung jawab menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Akuntabilitas menjadi manifestasi penting dari perilaku stewardship karena aparatur harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Indrijawati & Anwar, 2024; Pangayow & Patma, 2021)

Good Governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip tersebut. Audit desa melengkapi mekanisme tata kelola dengan menyediakan fungsi pemeriksaan dan pengawasan atas proses maupun hasil

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, akuntabilitas dan audit secara konseptual dapat dipandang sebagai dua mekanisme yang saling melengkapi dalam mendukung pencapaian kinerja keuangan pemerintah desa. (Sofyani et al., 2022; Utomo & Suharto, 2018)

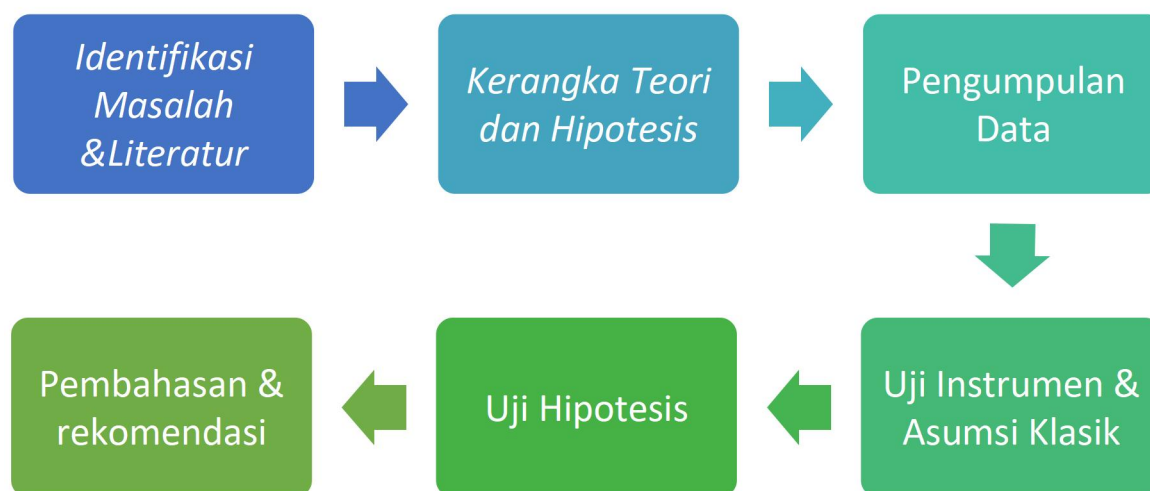
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan secara tertib, transparan, sesuai ketentuan, dan dapat ditelusuri. Audit desa dipahami sebagai mekanisme pemeriksaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa yang bertujuan mengidentifikasi kelemahan, memastikan kepatuhan, dan mendorong tindak lanjut perbaikan. Kinerja keuangan pemerintah desa menggambarkan kualitas pencapaian pengelolaan sumber daya keuangan yang tercermin dalam efektivitas penganggaran, realisasi belanja, pengelolaan aset, dan pencapaian tujuan keuangan desa. (Indrijawati & Anwar, 2024; Pangayow & Patma, 2021).

Pengembangan Hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tahapan pengelolaan keuangan. Semakin baik pelaporan, dokumentasi, keterbukaan, dan kepatuhan, semakin mudah penggunaan sumber daya ditelusuri dan dikendalikan. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan kualitas kinerja keuangan. Oleh karena itu dirumuskan H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Audit desa memberikan mekanisme pemeriksaan dan pengawasan yang dapat mengidentifikasi kelemahan, mendorong koreksi, dan memastikan tindak lanjut rekomendasi. Ketika fungsi audit berjalan efektif, pemerintah desa memperoleh umpan balik untuk memperbaiki pengendalian dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu dirumuskan H2: Audit Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Akuntabilitas dan audit memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban internal atas pengelolaan sumber daya, sedangkan audit menyediakan mekanisme pemeriksaan dan pengawasan. Kombinasi keduanya diperkirakan lebih mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan dibandingkan hanya mengandalkan salah satu mekanisme. Oleh karena itu dirumuskan H3: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menguji hubungan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert 1–5 kepada aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Dataset aktual yang dianalisis terdiri atas 207 responden dari 72 desa. Data telah melalui proses cleaning dan tidak ditemukan missing values maupun nilai di luar rentang skala Likert 1–5.

Instrumen terdiri atas 22 item, yaitu delapan item Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1), delapan item Audit Desa (X2), dan enam item Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y). Sesuai rancangan proposal, responden diarahkan pada aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, memiliki masa kerja minimal satu tahun, dan memahami proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan desa



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), dan koefisien determinasi (R^2). Estimasi koefisien regresi menggunakan Robust Standard Errors HC3. Model empiris yang digunakan adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, dengan Y sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, X_1 sebagai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan X_2 sebagai Audit Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini menggambarkan profil aparatur pemerintah desa yang menjadi sumber data penelitian. Sebanyak 207 responden yang berasal dari 72 desa di Kabupaten Gowa berpartisipasi dalam penelitian. Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, dan jabatan. Informasi mengenai karakteristik tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang responden yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan jabatan, responden mencakup Kaur Keuangan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Siskeudes, PPKP, dan jabatan lainnya, sehingga data penelitian berasal dari aparatur yang memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan keuangan desa. Rincian karakteristik responden disajikan pada Tabel berikut :

Table 1 Karakteristik Responden

Karakteristik/Kategori	n	%
Laki-laki	129	62,32%
Perempuan	78	37,68%
SMA	86	41,55%
D3	20	9,66%
S1	99	47,83%
S2	2	0,97%
Masa kerja 1–3 tahun	17	8,21%
Masa kerja 4–6 tahun	22	10,63%
Masa kerja > 6 tahun	168	81,16%
Kaur Keuangan	59	28,50%
Kepala Desa	48	23,19%

Sekretaris Desa	40	19,32%
Operator Siskeudes	39	18,84%
PPKP	9	4,35%
Kategori jabatan lainnya	12	5,80%

Sumber: Data diolah, 2026

Responden didominasi laki-laki sebesar 62,32%. Dari sisi pendidikan, lulusan S1 merupakan kelompok terbesar sebesar 47,83%, diikuti SMA sebesar 41,55%. Sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari enam tahun (81,16%), sehingga secara deskriptif responden memiliki pengalaman yang relatif panjang dalam lingkungan pemerintahan desa. Dari sisi jabatan, Kaur Keuangan merupakan kelompok terbesar (28,50%), diikuti Kepala Desa (23,19%) dan Sekretaris Desa (19,32%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa data diperoleh dari aparatur yang secara substantif dekat dengan proses pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Item	Mean/Item	SD	Min	Max	Kategori
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	8	4,2681	0,3985	2,7500	4,8750	Sangat Tinggi
Audit Desa (X2)	8	4,1159	0,4193	2,1250	4,8750	Tinggi
Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y)	6	4,0548	0,4464	2,3333	5,0000	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2026

Rata-rata akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 4,2681 menunjukkan persepsi yang sangat tinggi. Audit desa memiliki rata-rata 4,1159 dan kinerja keuangan pemerintah desa sebesar 4,0548; keduanya berada pada kategori tinggi. Secara umum, responden menilai praktik tata kelola, pengawasan, dan kinerja keuangan desa berada dalam kondisi positif.

Table 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Rentang r hitung	r tabel	Status	Cronbach α
X1 Akuntabilitas	X.1–X.8	0,4709–0,6436	0,1364	Valid	0,6854
X2 Audit Desa	X2.1–X2.8	0,4556–0,6377	0,1364	Valid	0,7275
Y Kinerja Keuangan	Y.1–Y.6	0,4505–0,6865	0,1364	Valid	0,6379

Sumber: Data diolah, 2026

Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Dengan $N = 207$, r tabel yang digunakan dalam workbook adalah 0,1364 pada $\alpha = 0,05$. Seluruh item memiliki r hitung di atas r tabel sehingga seluruh 22 item dinyatakan valid. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,6854 untuk X1, 0,7275 untuk X2, dan 0,6379 untuk Y menunjukkan bahwa ketiga konstruk memenuhi batas reliabilitas yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Metode	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	KS = 0,0561; $p = 0,5140$	$p > 0,05$	Normal
Multikolinearitas	VIF	$X1 = 1,4510$; $X2 = 1,4510$	$VIF < 10$	Bebas multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Breusch-Pagan	LM = 5,7429; $p = 0,0566$	$p > 0,05$	Homoskedastis
Autokorelasi	Durbin-Watson	$d = 2,2653$	Mendekati 2	Bebas autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi dasar regresi. Residual berdistribusi normal, tidak ditemukan multikolinearitas, tidak terdapat bukti heteroskedastisitas pada taraf 5%, dan nilai Durbin-Watson menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi yang mengganggu estimasi model.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 4,8546 + 0,2058X_1 + 0,3780X_2$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 4,8546 menunjukkan bahwa apabila Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X_1) dan Audit Desa (X_2) dianggap tidak mengalami perubahan, maka nilai dasar Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) diperkirakan berada pada tingkat 4,8546.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,2058 bernilai positif. Artinya, semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Desa cenderung meningkat. Setiap peningkatan satu satuan akuntabilitas, dengan asumsi Audit Desa tetap, diikuti peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,2058 satuan.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,3780 juga bernilai positif. Artinya, semakin baik Audit Desa, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Desa cenderung meningkat. Setiap peningkatan satu satuan audit desa, dengan asumsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa tetap, diikuti peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,3780 satuan.
4. Dibandingkan dengan X_1 , koefisien X_2 lebih besar, sehingga secara matematis Audit Desa memberikan perubahan yang lebih besar terhadap nilai prediksi kinerja keuangan ketika perubahan variabel lainnya dikendalikan. Namun, untuk menentukan variabel yang paling dominan, interpretasi utama tetap menggunakan standardized beta, bukan sekadar membandingkan koefisien regresi yang belum distandardisasi.

Table 5 hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	SE HC3	t	p-value	Beta standar	Keputusan
Konstanta	4,8546	1,7297	2,8067	0,0050	—	—
X1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,2058	0,0583	3,5316	0,0004	0,2450	H1 diterima
X2 Audit Desa	0,3780	0,0486	7,7800	<0,001	0,4734	H2 diterima

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X_1) dan Audit Desa (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y). Model regresi diestimasi menggunakan Robust Standard Errors HC3 untuk memperoleh estimasi kesalahan baku yang lebih robust dalam pengujian koefisien. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki arah koefisien positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan audit desa berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil lengkap estimasi model disajikan pada Tabel berikut..

Persamaan regresi menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa memiliki arah hubungan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hasil ini menjadi dasar untuk pengujian hipotesis secara parsial melalui uji *t* dan secara simultan melalui uji *F*.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1) dan Audit Desa (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y).

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F-hitung	p-value	Keterangan
Regresi	71,9022	< 0,001	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai F-hitung sebesar 71,9022 dengan p-value < 0,001. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara simultan signifikan. Dengan demikian, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hasil ini mendukung H3.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Table 7. Koefisien Determinasi

Ukuran Model	Nilai
R ²	0,4135
Adjusted R ²	0,4077
X2 Audit Desa	0,3780

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai R² sebesar 0,4135. Artinya, 41,35% variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dapat dijelaskan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa. Sementara itu, sebesar 58,65% variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai Adjusted R² sebesar 0,4077 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa adalah sebesar 40,77%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemerintah desa mempertanggungjawabkan proses pengelolaan keuangan, semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan. Akuntabilitas yang diwujudkan melalui perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang sesuai ketentuan, pencatatan dan

dokumentasi yang tertib, pelaporan yang tepat, serta keterbukaan informasi membuat penggunaan sumber daya keuangan menjadi lebih terarah dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi menjadi mekanisme yang membantu pemerintah desa memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan sesuai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Secara teoretis, temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Stewardship Theory, yang memandang aparatur pemerintah sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya organisasi untuk kepentingan publik. Dalam perspektif ini, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur atas amanah yang diterima, sehingga semakin kuat pertanggungjawaban yang dilakukan, semakin besar peluang terciptanya pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada tujuan organisasi. Perspektif Good Governance juga menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang disertai pertanggungjawaban, transparansi, dan kepatuhan akan memperkuat pengendalian terhadap penggunaan sumber daya publik dan mendukung pencapaian kinerja organisasi (Sofyani et al., 2022; Utomo & Suharto, 2018).

Secara empiris, temuan penelitian ini sejalan dengan Damayanti et al. (2021) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan keuangan dengan kinerja keuangan desa di Kabupaten Gowa. Hasil ini juga didukung oleh Indrijawati dan Anwar (2024) yang menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui kejelasan target anggaran dan kompetensi aparatur pengelola keuangan. Selanjutnya, Pangayow dan Patma (2021) menunjukkan bahwa perencanaan, akuntabilitas, dan pelaporan merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan desa. Kesamaan temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kualitas pertanggungjawaban dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan merupakan salah satu fondasi penting bagi peningkatan kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Audit Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Artinya, semakin efektif pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai pemerintah desa. Audit memberikan mekanisme untuk menilai apakah pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai ketentuan sekaligus membantu mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengelolaan. Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit memiliki pengaruh relatif lebih kuat dibandingkan akuntabilitas dalam menjelaskan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pemeriksaan dan pengawasan memiliki posisi strategis karena mampu memberikan umpan balik terhadap kelemahan pengelolaan dan mendorong pemerintah desa melakukan tindakan perbaikan.

Secara teoretis, temuan tersebut dapat dijelaskan melalui prinsip Good Governance, khususnya aspek akuntabilitas, efektivitas, kepatuhan, dan pengawasan. Audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal maupun internal yang membantu memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Dalam perspektif Stewardship Theory, mekanisme pengawasan tidak harus dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada aparatur desa, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa *steward* mampu menjalankan amanah secara optimal dan bertanggung jawab. Audit yang menghasilkan rekomendasi dan kemudian ditindaklanjuti akan memberikan umpan balik bagi aparatur untuk memperbaiki kelemahan pengelolaan, memperkuat pengendalian, dan meningkatkan kualitas keputusan keuangan. Dengan demikian, audit berperan sebagai mekanisme korektif sekaligus preventif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Secara empiris, temuan penelitian ini sejalan dengan Sugiharti et al. (2021) yang menunjukkan pentingnya pengawasan pengelolaan dana desa sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat tata kelola. Temuan ini juga memperoleh dukungan dari Olken (2007) yang menunjukkan bahwa mekanisme *monitoring* dapat berperan dalam mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya, **Rivan dan Maksun (2019)** menegaskan pentingnya sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tertibnya pengelolaan keuangan, sedangkan **Aligarh et al. (2025)** menunjukkan keterkaitan antara sistem keuangan pemerintah desa dengan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi. Kesamaan hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa audit dan mekanisme pengawasan yang efektif bukan sekadar instrumen pemeriksaan administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Desa secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan audit desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan desa tidak cukup hanya mengandalkan pertanggungjawaban administratif atau hanya mengandalkan mekanisme pemeriksaan. Keduanya perlu berjalan secara beriringan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan audit memberikan pemeriksaan dan umpan balik terhadap pelaksanaan pengelolaan tersebut. Dengan demikian, kombinasi pertanggungjawaban dan pengawasan menciptakan mekanisme tata kelola yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Secara teoretis, hubungan simultan tersebut memperkuat perspektif Stewardship Theory dan Good Governance. Dalam perspektif stewardship, aparatur desa sebagai pengelola amanah publik dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi bagi kepentingan masyarakat serta mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya. Sementara itu, Good Governance menempatkan akuntabilitas dan pengawasan sebagai unsur penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai aturan. Akuntabilitas dan audit karena itu memiliki fungsi yang saling melengkapi: akuntabilitas membangun kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, sedangkan audit menyediakan mekanisme untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah pertanggungjawaban tersebut telah dilaksanakan secara memadai. Kombinasi kedua mekanisme tersebut secara konseptual dapat menghasilkan tata kelola keuangan desa yang lebih kuat (Sofyani et al., 2022; Utomo & Suharto, 2018).

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai penelitian yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan sistem pengelolaan keuangan sebagai elemen yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Pangayow dan Patma (2021) menunjukkan pentingnya integrasi perencanaan, akuntabilitas, dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa. Sugiharti et al. (2021) menegaskan peran pengawasan dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa, sedangkan Nor et al. (2025) menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko penyimpangan. Hasil penelitian ini dengan demikian memperkuat bukti bahwa kinerja keuangan pemerintah desa merupakan hasil dari interaksi berbagai mekanisme tata kelola, khususnya pertanggungjawaban dan pengawasan yang berjalan secara bersamaan.

Berdasarkan perbandingan kekuatan relatif antarvariabel, audit desa merupakan prediktor yang lebih kuat terhadap kinerja keuangan dibandingkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa. Temuan ini memberikan makna bahwa dalam konteks penelitian ini, mekanisme pemeriksaan dan pengawasan memiliki peranan yang lebih besar dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan ketika kedua variabel diuji secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa kualitas pertanggungjawaban yang sudah berjalan perlu diperkuat dengan audit yang mampu memberikan evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan desa tidak cukup hanya dengan memperbaiki administrasi pertanggungjawaban, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan benar-benar diperbaiki.

Secara teoretis, posisi audit sebagai prediktor yang lebih kuat memperlihatkan bahwa mekanisme Good Governance tidak hanya membutuhkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, tetapi juga mekanisme evaluasi yang memastikan pertanggungjawaban tersebut benar-benar berjalan. Dalam perspektif Stewardship Theory, audit dapat berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan umpan balik kepada *steward* sehingga aparaturnya memperoleh dasar untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya dan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, audit tidak semata-mata diposisikan sebagai mekanisme pengendalian terhadap kemungkinan penyimpangan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan perbaikan kinerja.

Secara empiris, temuan tersebut memperkuat penelitian Sugiharti et al. (2021) yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen penting dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa. Hasil ini juga relevan dengan temuan Olken (2007) mengenai pentingnya monitoring dalam pengendalian penyimpangan sumber daya publik. Selain itu, Djasuli dan Risqillah (2025) menekankan pentingnya auditor sebagai aktor dalam memperkuat fungsi pengawasan. Oleh karena itu, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa perlu memberikan perhatian khusus pada kualitas pemeriksaan, kompetensi pemeriksa, ketepatan waktu audit, kualitas rekomendasi, dan terutama efektivitas tindak lanjut hasil audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan. Selain itu, audit desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan dan pengawasan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kelemahan pengelolaan, memastikan kepatuhan, serta mendorong perbaikan pengelolaan keuangan desa. Ketika diuji secara bersamaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan audit desa terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan desa membutuhkan kombinasi antara mekanisme pertanggungjawaban internal dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat relevansi Stewardship Theory dalam menjelaskan pengelolaan keuangan pemerintah desa. Aparatur desa sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik bagi kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Hasil penelitian juga memperkuat perspektif Good Governance, khususnya bahwa akuntabilitas dan pengawasan merupakan bagian penting dalam

mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan. Temuan bahwa audit desa memiliki pengaruh relatif lebih kuat menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan memiliki posisi strategis dalam memastikan proses pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan tindakan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Secara praktis, pemerintah desa perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui pelaporan yang tepat waktu, dokumentasi transaksi yang tertib, transparansi informasi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan desa secara optimal. Pemerintah Kabupaten Gowa juga perlu memperkuat kualitas audit melalui peningkatan kompetensi pemeriksa, ketepatan waktu pemeriksaan, kualitas rekomendasi, dan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penguatan tersebut penting karena audit dalam penelitian ini menunjukkan peranan relatif paling kuat dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah desa.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa, seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, kualitas perencanaan, dan kapasitas fiskal desa. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan data objektif atau data sekunder kinerja keuangan sebagai pelengkap data persepsi responden serta mempertimbangkan desain longitudinal agar perubahan kinerja dapat diamati dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model yang menguji mekanisme mediasi atau moderasi apabila didukung oleh desain penelitian dan data yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Aligarh, F., Probahudono, A. N., Widarjo, W., & Sudaryono, E. A. (2025). Village government's financial system: Investigating the impact of the technology–organization–environment (TOE) framework on performance, accountability, and transparency. *Information Development*. <https://doi.org/10.1177/02666669251352106>
- Damayanti, A., Surianto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis pengelolaan keuangan dalam menilai kinerja keuangan desa: Studi pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654–666. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257>
- Harun, H., Graham, P., Kamase, H. P., & Mir, M. (2021). A critical analysis of the impacts of financial literacy and NPM on village funds initiative in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 44(4), 336–345. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1722165>
- Indrijawati, A., Darmawati, Anwar, F., Fatmawati, & Samsinar. (2024). Accountability for village financial management: Clarity of budget targets and competency of village financial management officials. *Asian Development Policy Review*, 12(3), 281–303. <https://doi.org/10.55493/5008.v12i3.5170>
- Nor, W., Sofyani, H., Yuliastina, M., & Hudaya, M. (2025). Optimizing intellectual capital for good governance implementation in village government to enhance performance and reduce corruption. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2574549. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2574549>
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. <https://doi.org/10.1086/517935>
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, accountability and reporting of village financial management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203.

<https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208>

- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397–418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Sugiharti, D. K., Muttaqin, Z., & Ramadhani, R. H. (2021). The supervision of village fund management to prevent corruption. *Padjadjaran Journal of Law*, 8(3), 356–378. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3>
- Utomo, K. S., Sudarmo, S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis good governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66.
- Yap, N., Nugroho, M., & Rachmiyati, N. (2024). Evaluating village financial governance in top tourism destinations. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 2971–2991. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2638>